

15 ALASAN

UNTUK MEMINDAHKAN IBUKOTA NEGARA
KE KALIMANTAN DAN KERANGKA STRATEGI EKSEKUSI

Oleh

Andrinof A Chaniago

DAFTAR ISI

- *STORY*
- Kajian Rencana Pembangunan Kota Baru Sejak tahun 2015 di Bappenas
- Potensi Krisis Pembangunan di Masa Depan
- Keluar dari Model Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan
- Ketimpangan Penyebaran Penduduk
- Beberapa Gambaran Kondisi Terkini
- 15 Alasan Logis Pembangunan IKN di Kalimantan
- Proses Kognisi Presiden Jokowi
- Kerangka Strategi untuk Eksekusi

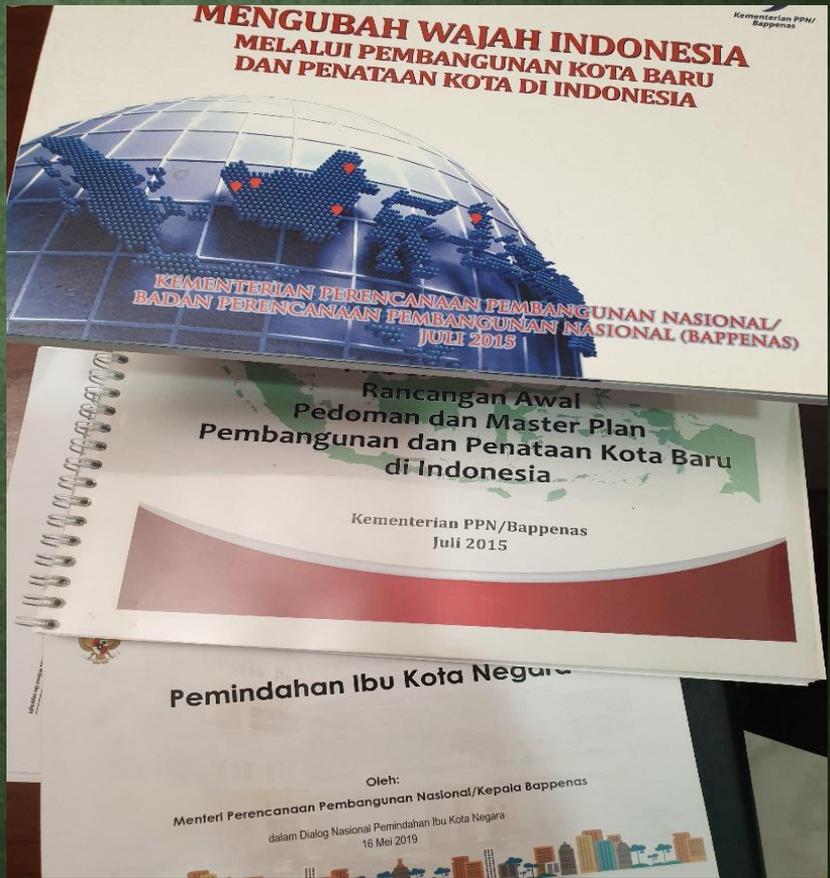
STORY

- Sejak tahun 2005 wacana Pemindahan Ibukota muncul secara musiman setiap tahun (karena peristiwa banjir, macet arus mudik)
- Presiden SBY (2004-2014) beberapa kali melontarkan “Wacana Tiga Opsi Pindah Ibukota”
- Hingga Pemerintahan Presiden SBY berakhir tahun 2014 tidak ada kajian untuk merespon wacana yang sudah muncul berulang-ulang setiap tahun
- Kebetulan, 9 Desember 2008, Tim Visi Indonesia 2033 melakukan *soft launching* dan melontarkan ide Pemindahan Ibukota ke Kalimantan berdasarkan kajian sangat awal
- Tahun 2015, untuk merespon wacana yang muncul secara rutin, Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian untuk Pembangunan Kota-kota Baru, termasuk untuk di Kalimantan (dalam rangka mengantisipasi menguatnya kembali wacana pemindahan Ibukota)
- Tahun 2016 wacana Pemindahan Ibukota kembali menguat dan ditanggapi oleh Presiden Jokowi setelah Presiden Jokowi berkunjung ke Palangkaraya, dengan memerintahkan Bappenas melakukan Kajian

PROSES KOGNISI PRESIDEN JOKOWI

- Saat Gubernur DKI, Gubernur Jokowi yang kemudian menjadi Presiden RI, merasakan keterbatasan kemampuan Pemerintah dan Pemerintah DKI untuk menghadapi pertumbuhan masalah Kota Jakarta
- Saat menjadi Presiden, Presiden Jokowi melihat pembangunan Indonesia dalam ketidakmerataan, ketidakadilan, dan melihat potensi asset lahan di Kalimantan untuk membangun kota publik di lahan milik negara.
- Ketika wacana gagasan pemindahan ibukota muncul kembali, Presiden Jokowi menginstruksikan Bappenas merespon wacana tersebut dengan membuat kajian yang lebih serius.

KAJIAN RENCANA IKN SEJAK TAHUN 2015 DI BAPPENAS



POTENSI KRISIS PEMBANGUNAN DI MASA DEPAN

- Kekurangan produksi hasil tanaman pangan pokok (beras)
- Potensi gelombang krisis besar (krisis sosial dan krisis ekonomi)
- Krisis ekologis merata di Jawa dengan ancaman banjir dan longsor rutin
- Krisis ekologis di daerah-daerah eksploitasi SDA
- Krisis sektor pelayanan publik di megaurban (Jabodetabek): perumahan, air bersih, udara bersih, transportasi, dll
- Krisis pelayanan publik musiman: angkutan mudik, darurat banjir, kecukupan air musim kemarau
- Ketimpangan antarkelas sosial dan dampak politiknya
- Ketimpangan antarwilayah: desa – kota, Jawa – luar Jawa, Kawasan Barat – Kawasan Timur dan Utara (Kalimantan)

KELUAR DARI MODEL PEMBANGUNAN YANG TIDAK BERKELANJUTAN

Berbahaya:

- Memperbesar yang sudah besar dan membiarkan yang tertinggal tumbuh lambat;
- Membuat defisit neraca lingkungan dan ekosistem makin besar;
- Membiarkan struktur ekonomi rapuh (*backward* dan *forward* linkage lemah, tidak berbasis kekuatan SDM, Iptek dan perluasan kemampuan penyerapan tenaga kerja secara riil);
- Indeks ketimpangan pembangunan tinggi (antarwilayah, antargolongan dan antarkelas sosial);
- Terjebak (dijebak) oleh ilusi megaproyek dan superioritas megaurban tetapi rawan salah kelola.

KETIMPANGAN PENYEBARAN PENDUDUK: 58% DI PULAU JAWA



Sebaran Penduduk menurut Pulau Utama

PERBANDINGAN PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH DARI TOTAL NASIONAL

| PULAU | PENDUDUK | WILAYAH |
|------------------------|----------|---------|
| | (%) | (%) |
| Sumatera | 21 | 21 |
| Jawa | 57* | 7 |
| Kalimantan | 6 | 30 |
| Bali-Nusa Tenggara | 6 | 4 |
| Sulawesi | 7 | 8 |
| Papua-Kepulauan Maluku | 3 | 23 |

Februari 2022

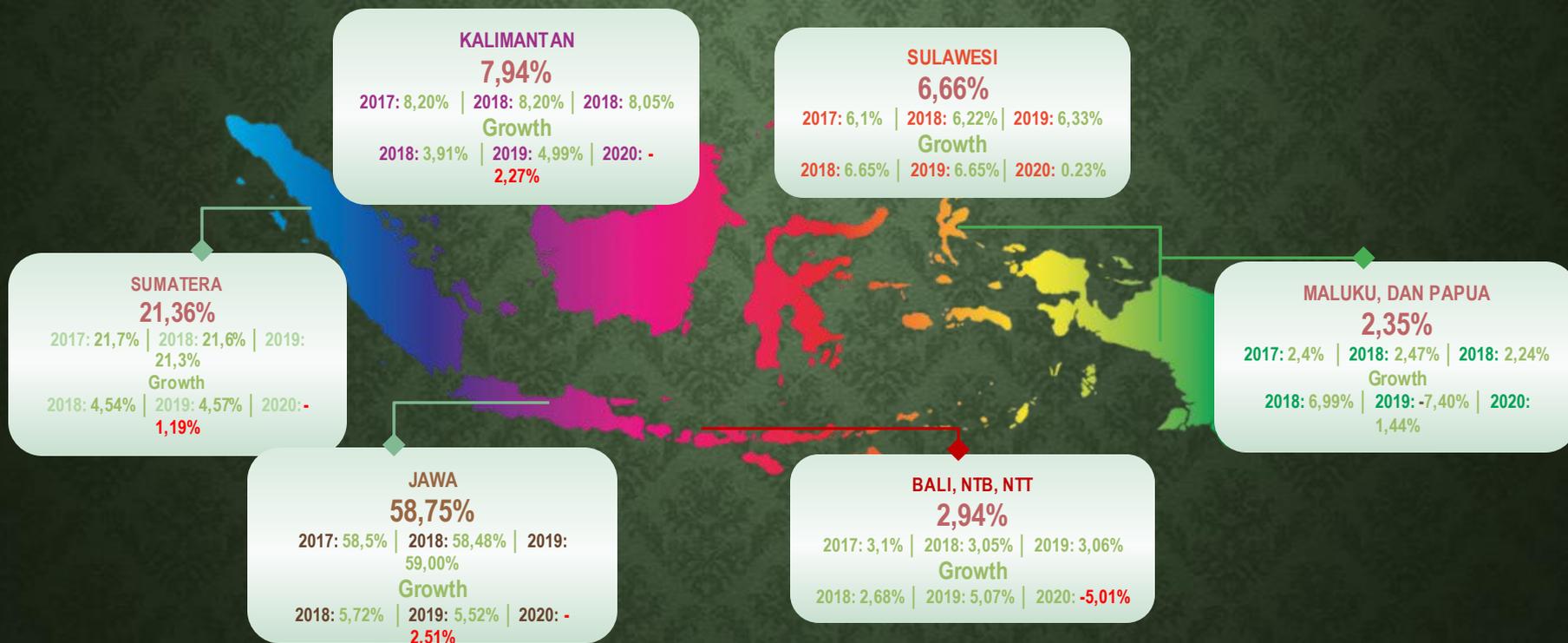
4/3/2022

*Angka dibulatkan ke bawah menjadi 57%

KONSENTRASI EKONOMI MASIH DI JAWA DAN SUMATERA

Jawa masih mendominasi kontribusi terhadap perekonomian.

10



Sumber : www.bps.go.id, 2021

BEBERAPA GAMBARAN KONDISI TERKINI

- Pertumbuhan penduduk Bodetabek per tahun rata-rata 4%, rata-rata nasional 1,2%
- Kemacetan kronis lalu lintas bukan hanya pemandangan di Jakarta, tetapi juga di Kota Bandung dan di Bodetabek, serta di sejumlah titik jalur Pantura Jawa;
- Segregasi (pengelompokan) sosial di Jabodetabek semakin tajam;
- Banjir besar di setiap musim hujan ekstrim sudah menjadi ancaman rutin bagi kawasan sepanjang Pantura Jawa
- Di musim kemarau, cadangan air bersih di Jawa hanya tersedia 20% dari kebutuhan, dan swastanisasi penyediaan air menggantikan peran pemerintah tetapi melanjutkan ketimpangan akses air sehat
- Sungai-sungai besar di Jawa masuk 10 sungai paling tercemar di dunia
- Sebanyak 40 ribu hektar lahan sangat produktif di Jawa beralih fungsi setiap tahun

15 ALASAN LOGIS

PEMBANGUNAN IKN DI KALIMANTAN

1. Memudahkan menata Jakarta dan kawasan megaurban Jabodetabek dengan mengurangi laju urbanisasi;
2. Menurunkan dan, sampai waktu tertentu, menghentikan pemborosan ekonomi akibat kemacetan yang mencapai puluhan Triliun Rupiah per tahun di Jabodetabek yang tidak mungkin hanya bisa dipecahkan melalui pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana maupun teknik rekayasa transportasi metode mutakhir;
3. Menyelamatkan lahan subur pertanian di Jawa dan menjaga konsistensi komitmen terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional;
4. **Menjadikan Indonesia bisa punya kota publik kelas dunia untuk sejajar dengan negara-negara lain, karena kota yang baru dibangun secara khusus oleh negara;**

(SAMBUNGAN)

5. Mewujudkan rasa keadilan dan menghilangkan diskriminasi pembangunan antarwilayah di tataran nasional sebagai modal untuk memperkuat kembali rasa Satu Bangsa (fungsi mencegah erosi nasionalisme);
6. Memanfaatkan potensi air dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan, dengan konsep pemanfaatan yang berkelanjutan;
7. **Membangun anak tangga** untuk mengefektifkan program percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Daerah Tertinggal, Pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan (karena pemimpin dan elite politik bermarkas di tengah-tengah wilayah Nusantara);

(SAMBUNGAN)

8. Menciptakan mesin penggerak keseimbangan antarwilayah sebagai salah satu fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang diharapkan menjadi pendorong penyebaran pusat pertumbuhan;
9. Memanfaatkan potensi lahan menganggur yang amat luas di Kalimantan untuk membangun kota Pusat Pemerintahan dan kota-kota satelit dengan konsep *Green Development* dan *Bioregion Management*;
10. Menghentikan secara bertahap laju korban kecelakaan arus mudik di Jawa yang sudah hampir merenggut 1000 jiwa selama 14 hari pergerakan arus mudik;
11. Membangun jalan yang efektif untuk menghidupkan ekonomi maritim dan perikanan dengan menekatkan Kota Pusat Pemerintahan ke kawasan perairan yang memiliki potensi besar di sektor maritim dan perikanan;

(SAMBUNGAN)

12. Mereposisi magnet pertumbuhan menjadi berada di tengah nusantara yang juga tidak terlalu jauh dari kawasan pusat perekonomian nasional saat ini (Jawa dan Bali), sehingga mendukung usaha membangun *multi-growth pole* nasional yang diikuti *multi-growth pole* wilayah untuk membangun perekonomian nasional yang efisien
13. Menstimulasi perpindahan sebagian industri dan kegiatan jasa dekat ke sumber bahan baku dan energi nasional dengan mendirikan kawasan-kawasan bisnis, seperti Kawasan industri, Kawasan wisata dan lain-lain, khusus berjarak sekitar 40 kilometer dari Ibukota baru;
14. Meletakkan Ibukota Pemerintahan di lingkungan paling aman dari gempa bumi
15. Menciptakan peluang untuk membangun masyarakat kewargaan karena IKN dibangun di atas hamparan lahan yang relatif kosong

DATA WILAYAH

| DATA | Kutai Kartanegara | Penajam Paser Utara | Total |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------|
| Luas Wilayah | 25.988,10 km | 3,333 km | 29.321,10 km |
| Danau Terbesar | D. Semayang (13.000 Ha) D. Melintang (11.000 Ha) | Tidak ada (ada Air Terjun Tembinus) | |
| Luas wilayah darat yang masuk IKN | 1.172 km (Kec. Sepaku) | 1.045,90 km (Semboja) dan 754 km (Muara Jawa) | 2.971 km |
| Jumlah Penduduk di wilayah IKN | 82.398 jiwa | 38.320 jiwa | 120.718 jiwa |
| Penduduk per km ² | | | 41 jiwa/km ² |
| | | | |

SEJARAH SINGKAT DAERAH WILAYAH IKN

- Mengetahui sejarah sosial dan budaya daerah 3 kecamatan yang masuk IKN penting untuk meredam klaim-klaim politik dari pihak tertentu, baik yang membawa nama suku, nama masyarakat Kaltim (seperti sekelompok aktifis NGO), atau membawa nama keluarga Kesultanan Kutai, atau lainnya
- Menurut sumber sejarah, di wilayah Kalimantan Timur sekarang, dahulu terdapat dua wilayah Kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Hindu dengan Raja Mulawarman di wilayah pedalaman Mahakam dan satu kerajaan lagi terdapat di daerah muara Sungai Mahakam yang bernama Kerajaan Kutai Kertanegara atau Kerajaan Kutai Lama dengan raja pertama Aji Batara Agung Dewa Sakti
- Kerajaan Hindu dengan raja Mulawarman diperkirakan sudah ada sejak Abad ke-4 atau abad ke-5, sedangkan Kerajaan Kutai Kertanegara baru ada sejak Abad ke-14
- Sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa Kerajaan Hindu-Kutai yang pusat di pedalaman Mahakam tadi bertahan sekitar 12 abad, kemudian leneyap karena peperangan dan karena masuknya Islam pada Abad 17
- Sementara Kerajaan Kutai Kertanegara yang berpusat di Muara Mahakam berganti menjadi Kesultanan pada Abad ke-17 setelah masuknya pengaruh Islam
- Pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara berakhir pada 21 Januari 1960

ASAL-USUL PENDUDUK

- Selain penduduk Suku Dayak yang berasal dari wilayah pedalaman Mahakam, penduduk di wilayah IKN sekarang berasal wilayah eks Kesultanan Banjar (Kalsel sekarang), dari Jawa dan Madura, dan dari Sulawesi
- Migrasi yang agak besar penduduk yang berasal dari Jawa terjadi ketika perusahaan Belanda mulai melakukan eksplotasi batubara di wilayah Kutai Kertanagara pada 1860-an (selain itu pihak Belanda mendatangkan kuli-kuli dari China)
- Penduduk asal Makassar mulai masuk ke wilayah Kutai Kertanaga pada akhir abad ke-16 bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Kutai Kertanagara melalui Makassar dan berlanjut dengan meningkatnya hubungan antara Kesultanan Kutai dan Kesultanan Banjarmasin dengan Kesultanan Makassar di Sulawesi
- Gelombang kedatangan penduduk asal Sulawesi pasca kemerdekaan terjadi di tahun 1950-an sehubungan dengan terjadinya Pemberontakan Kahar Muzzakar di Sulawesi Selatan
- Pada masa Orde Baru lewat progam transmigrasi, Pemerintah mendatangkan para transmigrant dari Jawa ke daerah Kecamatan Sepaku saat ini

TANDA-TANDA “MESTAKUNG”

30 Juli 2019



The screenshot shows a mobile browser view of a news article on the website Kontan.co.id. The article title is "Jokowi: Dari dulu saya sampaikan ibu kota pindah ke Kalimantan". The author is Yudho Winarto, and the date is Tuesday, July 30, 2019, at 17:20 WIB. There are social media sharing icons for Twitter, Facebook, and WhatsApp. Below the text is a photograph of President Joko Widodo and another man standing on a hill overlooking a bay. The article text discusses the president's long-standing intention to move the national capital to Kalimantan.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Ibukota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Pulau Kalimantan. Ia berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai mengunjungi kawasan wisata The

1 April 2015



The screenshot shows a mobile browser view of a news article on the website Kompas.com. The article title is "Andrinof Sebut Sejumlah Kota di Kalimantan Bisa Diusulkan Jadi Ibu Kota Negara". The date is Wednesday, April 1, 2015, at 22:15 WIB. There are social media sharing icons for Facebook, Twitter, WhatsApp, LINE, and Telegram. Below the text is a photograph of three men, including Andrinof, in a meeting. The article text discusses the possibility of moving the national capital to Kalimantan.

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA

LANGGANAN KOMPAS.ID

JELAJAH

Home > News > Regional

Andrinof Sebut Sejumlah Kota di Kalimantan Bisa Diusulkan Jadi Ibu Kota Negara

Rabu, 1 April 2015 | 22:15 WIB

Komentar

Lihat Foto

Penulis: **Kontributor Samarinda, Gusti Nara** | Editor: Bayu Galih

SAMARINDA - KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan

PELUANG EMAS

- Rencana Kawasan-Kawasan Industri di Kalimantan akan hidup efektif karena tetap dekat dengan Pemerintah Pusat dan relative tidak jauh dari Pulau Jawa;
- Kota Tenggarong, Kawasan Teluk Papan, kawasan pantai di Kabupaten Penajam dan Kabupaten Paser berpotensi besar menjadi daerah wisata;
- Dalam jangka panjang, Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru, Kalsel dan Tanjung Redep di Berau, Kaltim, berpotensi tumbuh sebagai daerah wisata dan industri maritim;
- Perguruan tinggi-perguruan tinggi di Kalimantan berpotensi naik kelas, dengan syarat memiliki Rencana Strategis untuk menjadi perguruan tinggi kualitas internasional.

KERANGKA STRATEGI UNTUK EKSEKUSI

- Gagasan membangun Kota Baru untuk Kota Pusat Pemerintahan telah mengalami kemajuan kongkrit di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena sudah dilakukan kajian secara bertahap sepanjang tahun 2015 – 2019
- Usulan Pemerintah untuk memindahkan ibukota ke, atau membangun Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan dari wakil-wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI
- Langkah lanjutan yang harus disiapkan adalah:
 - Melakukan sosialisasi argumentasi (*evidence*) ke publik untuk dipahami manfaatnya oleh publik
 - Melakukan kajian lanjutan dari Aspek Teknis Perencanaan Wilayah untuk menghasilkan rancangan kota publik yang berkualitas, Aspek Kelembagaan di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Pemerintahan Kota, Aspek Sosial-Politik dan Budaya, Aspek Pelayanan Umum Utama (Transportasi, Perumahan, Air Bersih, dsb), Aspek Pendanaan, dsb.

MENJAGA PROSES PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KOTA KELAS DUNIA

- Hunian kota harus didominasi hunian vertikal, dengan cara “memaksa” ASN sebagai penghuni awal dari hunian vertical (rumah susun/apartemen) tersebut
- Kawasan atau ruang underground dan calon kawasan underground harus disiapkan sejak awal, meskipun baru akan dimanfaatkan 50 tahun kemudian
- Transportasi publik massal harus diberlakukan sejak awal proyek dimulai dan kawasan calon kota baru harus disterilkan dari jenis angkutan umum kecil seperti angkot dan sejenisnya, untuk menghindari masalah angkot yang saat ini mewabah di kota-kota Indonesia saat ini

MODEL TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA

- Salah satu hal penting yang memerlukan kajian sejak awal adalah Model Tata Kelola Kota Ibukota Pemerintahan
- Sudah merupakan keputusan yang tepat mengambil bentuk tata kelola pemerintahan bukan berupa kota otonomi seperti kota-kota Indonesia sekarang, tetapi, berupa kota administratif yang partisipatif
- Pengalaman memberikan status kota otonom kepada Kota Batam yang melahirkan banyak konflik dan *dispute* kelembagaan serta membuat perkembangan kota menyimpang dari yang diharapkan, perlu dijadikan pelajaran untuk kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi
- Kota administratif yang partisipatif bisa bentuknya meletakkan kewenangan untuk mengatur pada Pemerintah Pusat tetapi memiliki Dewan Kota untuk menyerap aspirasi warga dan memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah Administratif.

5 TANTANGAN PEMBANGUNAN IKN

1. Politisasi (kepentingan politik sempit)
2. Keterbatasan anggaran
3. Keterbatasan pemahaman publik
4. Ego-ego sektoral dan bidang profesi dalam membuat perencanaan yang paripurna, holistik dan komprehensif
5. *Free riders*

TERIMA KASIH